

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kredit dalam istilah perekonomian merupakan suatu penundaan pembayaran, artinya uang atau barang yang diterima akan dikembalikan setelah jangka waktu tertentu. Bila tidak ada jangka waktu maka Koperasi akan mengalami kesulitan dalam masalah pembayaran. salah satu peran koperasi untuk memberikan bantuan kredit pada masyarakat yang mempunyai usaha kecil untuk kebutuhan konsumsi maupun sehari-hari. Menurut Mutiara Ekowati Indriastuti menjelaskan;

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam meminjam antara perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga¹.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama alam keuangan bukan bank (perbankan) yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha koperasi (perbankan). Karena tidak semua kredit yang disalurkan dalam keadaan lancar dimana sering terjadi kredit bermasalah atau adanya rentang waktu pengembalian kredit yang menimbulkan resiko yang sangat besar yang akan ditanggung oleh perusahaan terkait keterlambatan pembayaran

¹ Mutiara Ekowati Indriastuti, **Prosedur Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) bhina Raharja Cabang Karanganyar**: Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012, hal. 18

yang dilakukan oleh debitur. Kredit bermasalah merupakan dimana seorang nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak perusahaan/ koperasi sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui oleh debitur. Namun, mengingat sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dana koperasi/ perbankan berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang-undang.

Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan; **“kredit adalah jenis pinjaman yang harus dibayar kembali beserta bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”**². Ada dua alasan seseorang memerlukan kredit yaitu karena manusia adalah *homo oeconomicus* dan setiap manusia harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam sedangkan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan sangat terbatas. Hal tersebut menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Maka dari itu untuk meningkatkan usahanya manusia membutuhkan bantuan dalam bentuk permodalan yang disebut kredit. Maka dalam pemberian kredit perlulah diperhatikan dalam pengendalian internal baik secara prosedur maupun dalam hal kebijakan yang berlaku dalam koperasi tersebut. Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai pengendalian internal pemberian kredit dapat dikemukakan berikut ini.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erma bahwa prosedur pengendalian intern dalam pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Lalabata Rilau Kabupaten Soppeng telah memadai dengan didukungnya

² H. Malayu S.P. Hasibuan, **Dasar – dasar Akuntansi Perbankan**: Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal. 87

fungsi fungsi yang terkait serta pengawasannya yang cukup baik. Selanjutnya Clara Niken Dwi Haryani (2014) yaitu sebagian besar komponen sistem pengendalian internal yang diterapkan CYBG TP Yogyakarta sudah sesuai dengan pengendalian internal *COSO*, kecuali pada komponen aktivitas pengendalian, system pengendalian yang diterapkan pada CUBG KK Yogyakarta sudah efektif dengan tidak ditemukan adanya kesalahan dalam pemeriksaan sampel AUPL= DUPL, sebesar 5%. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Amira ahmad (2013) yaitu Prosedur pemberian kredit serta sistem pengendalian internal pemberian kredit yang dilaksanakan PT. Bank Mega Cabang Makassar jelas dan sangat baik. Namun, PT. Bank Mega Cabang Makassar sebaiknya menetapkan sebuah mekanisme khusus untuk mengetahui dan menelusuri ketidakwajaran yang terjadi dengan nasabah atau debitur maupun pihak luar lainnya baik dalam hal operasional, keuangan maupun ketaatan terhadap kebijakan yang berlaku.

Koperasi simpan pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir juga berusaha untuk mencegah para anggotanya agar tidak terlibat dengan hutang kepada rentenir, cara yang ditempuh adalah meningkatkan tabungan anggota dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah rendahnya. Koperasi simpan pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Namun Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri ini Berbeda dengan Bank dimana sejak tahun 2019 Peraturan *NPL* yang ditetapkan oleh Koperasi berbeda dengan Bank, *NPL* yang ditentukan oleh bank Indonesia yaitu dibawah atau maksimal 5%, sedangkan yang telah ditetapkan oleh Koperasi

Simpan Pinjam Makmur Mandiri yaitu dibawah/ maksimal 1.5% dan itu telah menjadi peraturan tetap yang ditetapiakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri pada Rapat Anggota Tahunan (RAT}, agar menandakan pinjaman tetap berjalan dengan lancar. Sebagai lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit, koperasi simpan pinjam berusaha memberikan kemudahan dalam layan pemberian kredit. Namun dapat diduga bahwa pengurus koperasi masih kurang memahami tata cara dan pelaksanaan pengendalian intern pemberian kredit, sehingga sering menimbulkan kredit bermasalah berupa *Non Performing Loan (NPL)*. Adapun data mengenai jumlah pemberian kredit, serta hitungan dalam bentuk persentase kredit yang bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir pada periode tahun 2020 dan 2021, tertera pada Tabel 1.1

Tabel 1. 1
jumlah Pemberian Kredit
Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir
Tahun 2020 dan 2021

Keterangan	2020 (Rp)	Persenta se	2021 (Rp)	Persentase
Kredit Lancar	281.300.000	97%	531.525.000	95%
Dalam Perhatian Khusus	5.220.000	1.80%	13.428.000	2.40%
Kredit Kurang Lancar	812.000	0.28%	3.357.000	0.60%

Kredit diragukan	1.711.000	0.59%	6.993.750	1.25%
Kredit Macet	957.000	0.33%	4.196.250	0.75%
Total Kredit	290.000.000	100%	559.500.000	100%
Total persentase NPL		1,2%		2,6%

Sumber: Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dapat diketahui jumlah kredit yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir kepada nasabah pada tahun 2020 dan 2021. Dalam tabel tersebut jumlah kredit yang ada atau yang disalurkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 290.000.000, namun terdapat kredit macet yaitu sebesar Rp. 957.000,-. Kemudian pada tahun 2021 jumlah kredit sebesar Rp. 559.500.000, dan kredit macet yaitu Rp. 4.196.250. Total NPL pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,2% sedangkan pada tahun 2021 naik sebesar 2,6%. Akan tetapi Peraturan Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang SAMOSIR menetapkan NPL (*non performing loan*) berada dibawah 1,5%. Jika Rasio NPL lebih tinggi dari pada Rasio NPL yang telah ditentukan maka dapat dikatakan tidak sehat. Sementara itu NPL pada tahun 2021 sudah melebihi NPL yang telah ditentukan oleh Peraturan perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam tulisan skripsi yang berjudul: **ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM MAKMUR MANDIRI CABANG SAMOSIR.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah adalah: **Bagaimana pengendalian intern terhadap pemberian kredit yang diterapkan Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir periode tahun 2020 dan 2021 terkhusus pada komponen pengendalian intern menurut COSO ?**

1.3 Tujuan Penelitian

Agar pembahasan lebih terarah, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: **Untuk mengetahui pengendalian intern terhadap pemberian kredit yang diterapkan Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir periode tahun 2020 dan 2021.**

1. 4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi mengenai bagaimana pengendalian internal terhadap pemberian kredit, serta mengetahui dan membandingkan antara teori yang didapat/ diperoleh dari bangku kuliah dengan keadaan sebenarnya dilapangan berkaitan dengan pengendalian internal pemberian kredit terkhusus pada Koperasi.

2) Manfaat praktis

1. Bagi penulis.

Dengan melakukan penelitian ini penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang kinerja pengendalian internal terhadap pemberian kredit dalam praktek.

2. Bagi manajemen perusahaan.

Bagi manajer perusahaan sebagai pedoman dalam pengendalian internal pemeberian kredit khususnya koperasi.

3. Bagi Peneliti lainnya.

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lainnya adalah sebagai sumber informasi, menjadi bahan referensi apabila melakukan penelitian yang serupa pada masa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Koperasi

Secara harafiah koperasi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation yang terdiri dari dua suku kata yaitu “ co ” yang berarti bersama dan “operation“ yang berarti bekerja. Jadi koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerja sama dapat disebut koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan orang demi kepentingan bersama. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia.

2.1.1 Pengertian dan Tujuan Koperasi

Pengertian Koperasi Menurut Fay dalam Hendrojogi yaitu:

Suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri dari atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi³.

R.M. Margono Djojohadikusumo dalam Hendrojogi menyatakan **“koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak berkerja sama untuk memajukan ekonominya”⁴**. pengertian koperasi menurut Richard Kohl dan Abrahamson pengertian koperasi (dalam Ropke) adalah **“badan usaha dengan kepemilikan dan pemakai jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan**

³ Fay, **Koperasi dalam teori dan praktek**: Jakarta, 2012 hal. 20

⁴ R.M. Margono Djojohadikusumo, **Sepuluh Tahun Koperasi**: Jakarta, 2012, hal. 21

usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha itu”⁵.

Sedangkan Menurut Undang-Undang Perkoperasian Bab 1 pasal 1 tahun 2012 koperasi mempunyai pengertian sebagai berikut: “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.” Jadi dapat diartikan koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan.

Menurut Sagimun M.D pengertian koperasi Simpan Pinjam yaitu:

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang memberikan pinjaman yang sebanyak mungkin memberikan manfaat dengan syarat-syarat yang mudah dan ringan, selain itu koperasi simpan pinjam hanya bertugas menyimpan, menyediakan atau mengusahakan pinjaman atau kredit bagi anggota dan masyarakat umum⁶.

Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggotapengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota. Pengertian ini disusun tidak hanya berdasar pada konsep koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial tetapi secara lengkap

⁵ Richard Kohl dan Abrahamson dalam **ropke**, 2013, hal. 13

⁶ Sagimun M.D, **Koperasi Indonesia**, 1985, hal. 69-74

telah mencerminkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Norma dan kaidah tersebut dalam UU tersebut lebih tegas dijabarkan dalam fungsi dan peran koperasi Indonesia sebagai:

- a. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,
- b. Alat untuk mempertinggi kehidupan manusia dan masyarakat,
- c. Alat untuk memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan
- d. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Tujuan koperasi Menurut Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 4, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Menurut Sitio Arifin Halomoan Tamba :

Tujuan koperasi Indonesia dalam UU No 25 tahun 1992 tentang koperasi pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. ⁷⁾.

Tujuan perusahaan koperasi, antara lain:

- a. Mempertahankan, jika mungkin meningkatkan bagian pasar dari satu (beberapa) barang dan jasa, dan menekan serendah rendahnya biaya produksi, yang harus lebih rendah atau sekurang-kurangnya sama dengan biaya produksi para pesaingnya.
- b. Melindungi potensi ekonomisnya, menjaga /mengamankan likuiditasnya, dan menciptakan inovasi.

Namun jika dirinci, koperasi sejatinya memiliki nilai-nilai keutamaan yang melandasi bertumbuh kembangnya idealisme koperasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Rasa solidaritas
- b. Menanam sifat individualitas (tahu akan harga diri)
- c. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan self-help dan autoaktif guna kepentingan bersama.
- d. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dan kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri.
- e. Menghidupkan rasa tanggung jawab moral dan sosial.

Sitio Arifin, dan Halomoan Tamba, **Koperasi Teori dan Praktek**: Erlangga, Jakarta, 2001, hal. 15

2.1.2 Prinsip - Prinsip Koperasi

Menurut Setio Arifin Halomoan Tamba, berdasarkan UU No. 12 tahun

1967, prinsip prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia.
- b. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi ebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
- c. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing masing anggota.
- d. Adanya pembatasan bunga atas modal.
- e. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dari masyarakat pada umumnya.
- f. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.
- g. Swadaya, swkarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri⁸.

Menurut Hiro Tugiman, tujuan pelaporan keuangan koperasi adalah:

1. Laporan keuangan koperasi dapat menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan pemakai lainnya untuk :
 - a. Mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi.
 - b. Mengetahui prestasi keuangan koperasi selama satu periode dengan sisa hasil usaha dan manfaat keanggotaan koperasi sebagai ukuran.
 - c. Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, kewajiban dan kekayaan bersih, dengan pemisahaan antara yang berkaitan dengan anggota dengan bukan anggota,
 - d. Mengetahui transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban, kekayaan bersih dalam suatu periode, dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggota.
2. Informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan koperasi:
 - a. Sumberdaya ekonomis yang dimiliki koperasi.
 - b. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh koperasi.
 - c. Kekayaan bersih yang dimiliki oleh anggota dan koperasi itu sendiri.
 - d. Sumber dan penggunaan dan serta informasi informasi lain yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi. ⁹

⁸ Setio Arifin Halomoan Tamba, *Op. Cit.*,hal. 20-23

⁹ Hiro Tugiman, *Pengantar Audit Sistem Informasi* :kanisius, Yogyakarta, 1996, hal.

2.2 Konsep Kredit

2.2.1 Pengertian dan Tujuan Pemberian kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “credere” yang berarti kepercayaan dan bahasa Latin “creditum” yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Oleh sebab itulah yang menjadi dasar dari kredit adalah kepercayaan. Pengertian kredit menurut Kasmir ; **“kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil”¹⁰**. Kemudian adanya kesepakatan antara kreditur dengan debitur, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.

Tujuan kredit dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan dari bunga yang diberikan oleh nasabah.
- b. Membantu nasabah untuk membeli kebutuhan maupun mengembangkan usahanya.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian bangsa
- d. Semakin banyak kredit tersalur maka semakin baik pula perekonomian bangsa. Terlebih lagi, jika kredit yang dimainkan adalah kredit usaha. Banyaknya kucuran dana dalam kredit usaha akan meningkatkan pembangunan bangsa dalam berbagai sektor ekonomi.

2.2.2 Fungsi dan Jenis-jenis kredit

Menurut Kasmir, suatu fasilitas kredit memiliki fungsi berikut:

- a. **Untuk meningkatkan daya guna uang Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang. Maksudnya, jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.**

¹⁰ Kasmir ,. **Op. Cip.**, hal. 95

- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- c. Kredit dapat meningkatkan daya guna barang Kredit dapat diberikan oleh perusahaan dan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
- d. Meningkatkan peredaran barang Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa Negara¹¹.

2.3 Konsep Pengendalian Internal

2.3.1 Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern

Pada dasarnya pengendalian intern dibentuk oleh manajemen perusahaan untuk menghindari penyelewengan/ penyimpangan (fraud). Menurut Azhar Susanto bahwa pengendalian internal adalah **"Penyelewengan/ penyimpangan atau pelanggaran hukum merupakan kebohongan atau Tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud memperoleh keuntungan secara tidak sah"**¹².

Untuk menghindari fraud, manager perusahaan harus dapat mengelola manajemen sumber daya yang dimilikinya dengan tata cara informasi yang baik (Good

¹¹ Kasmir, **Manajemen Perbankan**: Rajawali Persada, Jakarta, 2000, hal. 97-98

¹² Azhar susanto, **Sistem Informasi Akuntansi**: Universitas Padjadjaran , 2017, hal. 96

corporate governance – GCG), melalui penerapan sistem informasi yang berkualitas merupakan dasar bagi manager didalam mengambil keputusan, dimana informasi yang berkualitas tidak akan menyesatkan para pengambil keputusan dan mampu mendeteksi potensi risiko sejak dini (*Early Warning System*).

Menurut Mei Hotma Mariati Munthe pengendalian internal adalah:

Proses untuk mencapai tujuan atau merupakan rangkaian tindakan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pengendalian internal bukan hanya terdiri atas pedoman, kebijakan, dan formulir namun dijalankan oleh setiap orang dari jenjang organisasi mulai dari manajemen atas, tengah, bawah bahkan sampai tingkat personnel operational. ¹³.

Tujuan Pengendalian Intern

Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan yaitu Keandalan informasi, Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, Efektivitas dan efisiensi operasi. tujuan pengendalian intern.

menurut Azhar Susanto bahwa Tujuan pengendalian intern adalah:

untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan dari setiap aktivitas (system informasi dan system operasi) akan dicapai, untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan karena kejahatan, bahaya, atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyimpangan, penyelewengan dan penggelapan, untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum telah terpenuhi. ¹⁴.

¹³ Mei Hotma Mariati Munthe, **Sistem Informasi Akuntansi**: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2019, hal. 130

¹⁴ **Loc. Cit.**,

tujuan pengendalian internal menurut Mulyadi adalah:

1. menjaga kekayaan organisasi

Kekayaan fisik suatu perusahaab dapat dicuri, disalahgunakan atqau dihancurkan karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.

2. mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan modal menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.

3. mendorong efisiensi

Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah dipublikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.¹⁵

Tujuan dari pengendalian intern akan terlaksana dengan baik bila pengendalian internal dijalankan dengan baik pula dan sesuai dengan prosedur yang ada. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pengendalian internal ini adalah untuk menjaga keamanan harta milik suatu organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efesiensi dalam operasi dan membantu agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

2.3.2 Komponen-komponen Pengendalian Intern

¹⁵ Mulyadi, **sistem informasi akuntansi**: salemba empat, Jakarta, 2016, hal. 130

Menurut COSO (*committee of sponsoring organization*) 2013 ada 5 (lima) komponen-komponen pengendalian intern, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar, proses dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal diseluruh organisasi. Dalam COSO terdapat lima prinsip yang berkaitan dengan lingkungan pengendalian antara lain yaitu: komitmen terhadap integritas dan nilai etika, melaksanakan tanggung jawab pengawasan, menetapkan struktur, wewenang, dan tanggung jawab, komitmen terhadap kompetensi dan mendorong akuntabilitas atas system pengendalian internal.

2. Penaksiran Risiko (*Risk Assesment*)

Entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan identifikasi dan analisis terhadap resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Penaksiran resiko dapat ditujukan pada bagaimana entitas mempertimbangkan kemungkinan transaksi tidak tercatat atau mengidentifikasi dan menganalisis estimasi yang dicatat dalam laporan keuangan. Setiap organisasi memiliki risiko, dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis (profit dan non profit) maupun non bisnis. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat di analisis dan evaluasi sehingga dapat di perkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan dan kesalahan. Prosedur pengendalian meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Personil yang kompeten, mutasi tugas dan cuti wajib.
- Pelimpahan tanggung jawab.
- Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait.
- Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional.

4. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian intern dapat di monitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi.

5. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen Winnebago pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.

Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal. Hukum, peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal.

2.3.3 Kriteria pengendalian intern pemberian kredit yang efektif

Setiap perusahaan keuangan harus memiliki struktur pengendalian intern yang memadai dalam pemberian kredit kepada debitur. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang nantinya akan mengakibatkan penurunan profitabilitas.

Pengendalian intern yang efektif dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Adanya pemisahan fungsi antara pejabat yang terkait.
2. Adanya kebijakan atau peraturan yang ketat terhadap pemberian kredit.
3. Adanya pejabat yang kompeten dibidangnya.
4. Adanya review terhadap pelaksanaan kredit yang telah diberikan secara terus menerus.

Jenis jenis pengendalian internal

Berdasarkan tujuan dari pengendalian internal maka jenis pengendalian internal ini dibagi menjadi dua yaitu, pengendalian internal akuntansi, dan pengendalian internal administrasi.

1. Pengendalian Internal Akuntansi, bahwa yang dikendalikan dalam pengendalian internal akuntansi ini meliputi, keandalan data, persetujuan,

pemisahan fungsi operasional, pencatatan, pengawasan, serta pengawasan aset perusahaan.

2. Pengendalian internal administrasi, bahwa dalam pengendaliannya, internal administrasi mengurus beberapa hal meliputi, efisiensi usaha, analisis risiko, kebijakan direksi, manajemen sumber daya, dan pengendalian mutu.

Menurut Tjukria P.Tawaf menyatakan bahwa Pengendalian intern terhadap penyaluran kredit terdiri atas **“aspek pengendalian intern kredit, proses aktivitas pengendalian kredit, serta unsur-unsur pengendalian intern kredit”**¹⁶.

Hubungan Pengendalian Intern Terhadap Pemberian kredit

Pengendalian kredit adalah usaha usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit. Masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan adalah ketergantungannya yang besar terhadap pengembalian sejumlah uang dari nasabah yang dipinjam secara kredit. Maka pihak perusahaan membutuhkan suatu pengendalian intern yang memadai dalam kegiatan pemberian kreditnya. Oleh karena itu pengendalian internal berperan dalam menunjang kelancaran penyaluran kredit.

¹⁶ Tjukria P.Tawaf, **Audit Intern Bank**: Salemba Empat, Jakarta, 1999, hal. 271

- b. *Party* (golongan), yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas yang berbeda.
- c. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.
- d. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
- f. *Profitability*, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- g. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan atau barang atau orang atau jaminan asuransi.

Jenis-jenis Kredit

Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dan yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Secara umum jenis kredit jika dilihat dari berbagai segi antara lain : dilihat dari segi kegunaan, dilihat dari segi tujuan kredit, dilihat dari segi jangka waktu, dilihat dari segi jaminan dan dilihat dari sector usaha.

1. Dilihat dari segi kegunaan:

- a. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk digunakan dalam melakukan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
- b. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

1. Dilihat dari segi tujuan kredit:

- a. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
- b. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
- c. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan usaha debitur dibidang perdagangan. Biasanya

untuk membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

2. Dilihat dari segi jangka waktu
 - a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - b. Kredit jangka menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi.
 - c. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya di atas 3 atau 5 tahun. Biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan sawit atau manufaktur untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
3. Dilihat dari segi jaminan
 - a. Kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan yang dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
 - b. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas nama baik debitur selama ini.
4. Dilihat dari sektor usaha

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
- b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk membiayai jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
- c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar.
- d. Kredit pertambangan, kredit ini adalah jenis usaha tambang yang biayanya biasanya dalam jangka panjang, misalnya tambang emas atau minyak.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun saran dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f. Kredit perumahan, merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

2.3.5 Prosedur Pemberian Kredit

pemberian kredit adalah salah satu produk andalan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya yang banyak menarik minat masyarakat. Salah satu resiko dari pemberian kredit adalah munculnya kredit bermasalah atau sering disebut dengan kredit macet artinya kredit yang disalurkan tidak dapat ditagih kembali sehingga mengancam likuiditas perusahaan tersebut .

Menurut Taswan, Penyaluran kredit adalah:

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹⁷.

Oleh karena itu sumber utama pendapatan perusahaan berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga. Prosedur penyaluran kredit maksudnya adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah perusahaan dalam menilai suatu kelayakan permohonan kredit. Prosedur penyaluran kredit adalah Persiapan kredit, Analisis kredit, Keputusan Kredit, Pelaksanaan dan administrasi kredit, Supervisi kredit dan pembinaan debitur.

Secara umum tahapan-tahapan/prosedur tahapan penyaluran kredit adalah Pengajuan permohonan kredit, prosedur verifikasi kebenaran data, evaluasi data, negosiasi kredit, Pemeriksaan ke lapangan, Keputusan kredit, Penandatanganan perjanjian kredit, Realisasi kredit, Penyaluran kredit.

2.4 . Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam memperluas wawasan serta pedoman dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan hasil-hasil penelitian terdahulu yang serupa dengan pembahasan.

Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut dapat disajikan pada Tabel 2.1.

¹⁷ Taswan, **Akuntansi perbankan**: Edisi 3 UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2012, hal. 217

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Eka Winda Yuliana dan Hesti Widianti (2014)	Sistem pemberian kredit pada Unit koperasi Simpan Pinjam KUD Karya Mina Kota Tegal	Kualitatif Deskriptif	Fungsi fungsi yang terkait dalam pemberian kredit pada Unit Simpan Pinjam KUD Karya Mina Kota tegal sudah cukup baik dan lengkap dan amsing masing bagian sudah mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
2	Erma (2018)	Analisis Pengendalian Internal terhadap Penyaluran Kredit Usaha pada PT. BANK	Analisis Deskriptif	prosedur pengendalian intern dalam pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Lalabata Rilau Kabupaten Soppeng telah memadai dengan

		<p>RAKYAT INDONESIA UNIT LALABATA RILAU KABUAPTEN SOPPENG</p>		<p>didukungnya fungsi fungsi yang terkait serta pengawasannya yang cukup baik .</p>
3	<p>Mutiara Ekowati Indriastuti (2012)</p>	<p>Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam BHINA RAHARJA CABANG KARANGANY AR</p>	<p>Penelitian kualitatif</p>	<p>Prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan oleh KOPERASI Simpan Pinjam BHINA RAHARJA CABANG KARANGANYAR telah sesuai dengan prosedur. Dan telah sesuai dengan tahapan tahapan pengendalian.</p>
4	<p>Clara Niken Dwi Haryani (2014)</p>	<p>Analisis pengendalian intern pada system</p>	<p>Studi kasus melakukan penelitian terhadap ojek</p>	<p>sebagian besar komponen sistem pengendalian internal yang diterapkan CYBG</p>

		<p>pemberian kredit Union Barero Gratia KK Yogyakarta</p>	<p>tertentu.</p>	<p>TP Yogyakarta sudah sesuai dengan pengendalian internal COSO, kecuali pada komponen aktivitas pengendalian, system pengendalian yang diterapkan pada CUBG KK Yogyakarta sudah efektif dengan tidak ditemukan adanya kesalahan dalam pemeriksaan sampel AUPL= DUPL, sebesar 5%.</p>
5	Amirah Ahmad (2013)	<p>Tinjauan efektifitas penerapan system pengendalian internal pemberian kredit pada PT</p>	<p>Kualitatif, yang terdiri dari data non angka yang bersifat deskriptif</p>	<p>Prosedur pemberian kredit serta sistem pengendalian internal pemberian kredit yang dilaksanakan PT. Bank Mega Cabang Makassar jelas dan sangat baik. Namun, PT. Bank Mega</p>

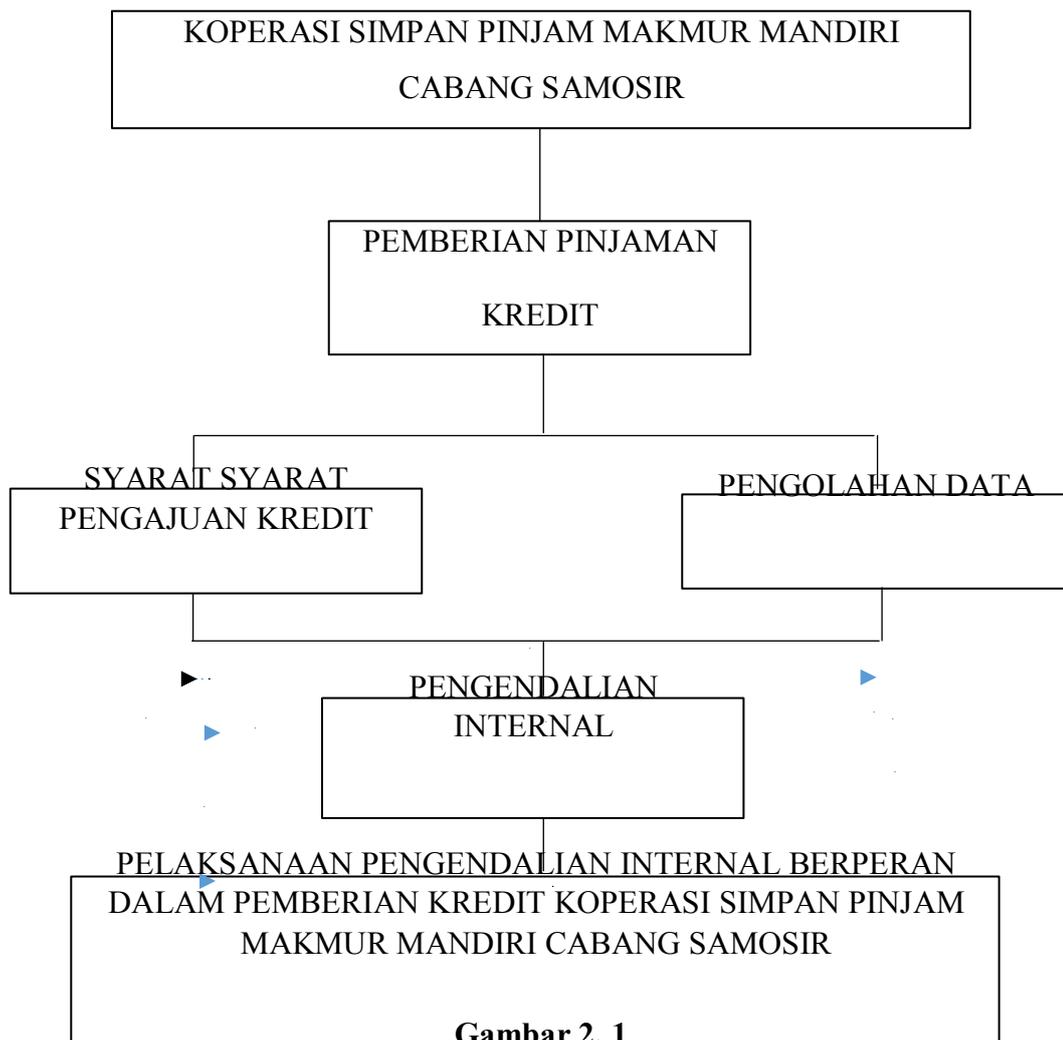
		Bank Mega Cabang Makassar		Cabang Makassar sebaiknya menetapkan sebuah mekanisme khusus untuk mengetahui dan menelusuri ketidakwajaran yang terjadi dengan nasabah atau debitur maupun pihak luar lainnya baik dalam hal operasional, keuangan maupun ketaatan terhadap kebijakan yang berlaku.
6	Ratna Bintara, Mochammad Dzulkirim, dan Achmad Husaini (2013)	Analisis sistem dan prosedur pemberian kredit Modal Kerja Dalam Upaya Mendukung Pengendalian	Kualitatif deskriptif	Fungsi internal audit pada koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo belum tersedia, sehingga pemeriksaan secara independen belum dapat terlaksana.

		Kredit (studi pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo Pacitan)		
--	--	--	--	--

Sumber: Data yang diolah dari <https://scholar.google.co.id>

2.5 .Kerangka Berpikir

Dalam melakukan pembahasan skripsi ini perlu dibuat kerangka berpikir, sehingga pembahasan akan lebih terarah dan dapat memberikan jawaban atas masalah yang dirumuskan. Adapun kerangka berpikir tertera pada Gambar 2.1.



Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah Penulis.

Dari Gambar 2.1. dapat dibuat penjelasan sebagai berikut yaitu kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menggambarkan pola pikir peneliti dengan menggabungkan teori atau konsep dengan fenomena yang telah diteliti sebagai masalah penting. Adapun variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu langkah-langkah pelaksanaan pengendalian internal dalam pemberian kredit Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti kegiatan perusahaan secara langsung pada system analisis informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada situasi yang diselidiki peneliti dan objek yang diteliti terpisah, proses penelitian dilakukan melalui pengukuran dengan bantuan alat yang baku dan objektif.

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian atau Objek Penelitian

Menurut sugiyono **“objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variable tertentu)”**¹⁸. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah penerapan pengendalian intern pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir.

b. Waktu Penelitian

Penelitian tentang analisis pengendalian internal terhadap pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir dilakukan pada tanggal 18 Januari 2022-10 Maret 2022.

¹⁸ Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D** :Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 13

Metode Pengumpulan Data

Sugiyono, mengemukakan bahwa metode pengumpulan data merupakan; **“langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian adalah mendapatkan data”**¹⁹. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data dengan jalannya tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Suatu percakapan langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan format tanya jawab yang terencana. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang kebijakan pemberian kredit, dan pelaksanaan pengendalian internal dalam pemberian kredit Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir. Pihak yang diwawancarai yaitu pengurus yang bertanggungjawab terhadap pemberian kredit, dan pihak akuntansi atau bendahara koperasi tersebut.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui keterangan secara tertulis yang merupakan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data yang diambil dari dokumen perusahaan yaitu laporan keuangan berupa jumlah kredit dan kredit macet pada tahun 2020 dan 2021 pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir.

¹⁹ Sugiyono, **Op. Cip.**, hal. 224

3.3 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber sumber yang terpercaya atau yang utama merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan, misalnya dari individu, karyawan, atau pendapat perseorangan, antara lain: hasil wawancara dari pihak Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir.
2. Data sekunder adalah data tertulis hasil kajian pustaka yang bertujuan memperoleh teori yang relevan, baik yang bersumber dari karya tulis ilmiah, yang relevan dengan orientasi penelitian atau yang diperoleh dari sumber yang sudah terdokumentasi di Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir.

3.4 Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan analisis data. Adapun metode analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Langkah langkah yang digunakan yaitu:

1. Melakukan analisis dengan mendeskripsikan dan memahami sistem informasi pengendalian internal dalam pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir.
2. Mengidentifikasi unsur-unsur pengendalian intern pemberian kredit secara deskriptif. Pendeskripsian meliputi komponen sistem informasi, pengendalian

internal, dokumen, catatan, dan fungsi yang dipakai dalam pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir.

3. Membandingkan hasil analisis penerapan pengendalian internal dalam pemberian kredit yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir terhadap teori yang berlaku secara umum. Dengan demikian dapat dibuat kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.